



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KARLINA TANGKULUNG, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Tomohon / 15 November 1994, Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Parentek, Jaga I, Kec. Lembean Timur, Kab. Minahasa (No. HP 085256359551).

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan :

STEVANUS Y. RAMBITAN, Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir Taler / 25 September 1993, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Touliang Oki, Kec. Eris, Kab. Minahasa.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

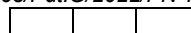
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 7 Nopember 2022 dalam Register Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2011 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 4 April 2012 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan **No. 7102CPK2711201100115**. Karena itu

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang mahaesa.
3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu **CHESY FELISIA RAMBITAN** yang lahir pada 15 Februari 2012.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidak cocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percekocokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh **TERGUGAT** yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada **PENGUGAT**.
6. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi secara terus menerus **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2013 sudah tidak tinggal serumah lagi.
7. Bahwa **TERGUGAT** tidak menafkahi **PENGUGAT** dan anak.
8. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, **TERGUGAT** yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada **PENGUGAT**, **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tidak tinggal serumah lagi dan **TERGUGAT** yang tidak menafkahi **PENGUGAT** dan anak telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk **RUMAH TANGGA** yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus sehingga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

10. Bahwa anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT CHESY FELISIA RAMBITAN** yang lahir pada 15 Februari 2012 masih dibawah umur sudah sepatutnya kalau hak asuh atas anak tersebut jatuh ketangan **PENGGUGAT** dengan biaya ditanggung bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai ia dewasa dan mandiri.
11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **PENGGUGAT** memohon agar **Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT** dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya.
12. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengizinkan Penitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan ke Buku Regester yang telah disiapkan untuk itu.
13. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 7102CPK2711201100115**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak **CHESY FELISIA RAMBITAN** yang lahir pada 15 Februari 2012 hak asuhnya jatuh ketangan **PENGGUGAT** dengan biaya ditanggung bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai ia dewasa dan mandiri.
4. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu.

5. Membebaskan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Desember 2022, tanggal 8 Nopember 2022 dan tanggal 18 Nopember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang berkepanjangan sejak usia perkawinan belum berlangsung lama, awalnya hanya masalah perbedaan pendapat kemudian terus terjadi pertengkaran berlangsung secara terus menerus dan pada akhirnya tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini pada akhirnya Penggugat mengambil jalan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan Tindakan Tergugat dan Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102CPK2711201100115, tertanggal 4 April 2012, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-03112022-0007, tertanggal 3 Nopember 2022, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7102021101120002, tanggal 3 Nopember 2022, diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1. Debora Bogian dan 2. Jonly Rantung, yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya di depan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di dihadapan Pemuka Agama Pdt. Olip G Pangayouw. S,TH (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn





secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu setahu para saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2013 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat belum lama mengakibatkan Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat dan saat ini pula Tergugat sudah ada wanita lain dan Penggugat juga sudah punya laki-laki lain dan sudah hidup bersama bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah punya anak dengan pasangan masing-masing .

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (b) dan (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama dengan pasangan masing-masing dan telah mempunyai anak dengan pasangan masing-masing saat ini, sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak asuh atas anak dibawah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi Penggugat yaitu dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **CHESY FELISIA RAMBITAN** yang lahir pada 15 Februari 2012 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ibunya (Penggugat) dan anak dengan Ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn





MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa sesuai dengan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 7102CPK2711201100115, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak CHESY FELISIA RAMBITAN yang lahir pada 15 Februari 2012 berada dalam asuhan PENGUGAT dengan biaya ditanggung bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **Jumat** tanggal **13 Januari 2023** oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **NUR DEWI SUNDARI, S.H.**, dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 7 Nopember 2022, Putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **16 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEIVID.D LOSU, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR DEWI SUNDARI, S.H.,

CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 363/Pdt.G/2022/PN Tnn

--	--	--



DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEIVID.D LOSU, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp100.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp600.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp770.000,00;</u>

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)